

MODUL 2

MEMAHAMI KONFLIK POLITIK

➤ Pengertian Konflik Politik

Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam kajian sosiologis, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain disebut dengan *gregariousness*. Lebih lanjut, interaksi sosial sendiri merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia¹³.

Interaksi yang terjadi pada kehidupan manusia memiliki potensi-potensi untuk menimbulkan konflik jikalau mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda. Konflik dalam interaksi sosial bisa terjadi biasanya antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, serta antara individu dengan kelompok karena berbeda atau bertentangan dengan tujuan mereka.

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Hal ini diperkuat oleh Ramlan Subakti yang menyatakan konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah¹⁴. Sehingga dapat dipahami bahwa Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Berkaitan dengan konflik, dalam studi ilmu-ilmu sosial dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan struktural fungsional (konsensus) serta struktural konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi namun saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Sedangkan pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Selain itu masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik¹⁵. Lebih lanjut Ramlan Surbakti menegaskan bahwa konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah¹⁶.

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik¹⁷. Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan¹⁸.

Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁶ Subakti, *Memahami Ilmu Politik*.

¹⁷ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009).

¹⁸ Maswadi Rauf, *Konsensus Dan Konflik Politik* (Jakarta: DIKTI, 2001).

sama lain saling bertentangan. Dengan demikian, makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau individu, kelompok dengan pemerintah.

Konflik sosial dan konflik politik mempunyai satu perbedaan, dimana konflik sosial terjadi di lingkungan masyarakat sedangkan konflik politik terjadi diantara para elit politik dan didalam suatu pemerintahan, konflik terjadi karena isu-isu yang tidak baik, ataupun bisa disebabkan oleh rasa kebencian dan prasangka terhadap lawan konflik yang berupaya menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka (manifest conflict), menurut Eric Hoffer adalah faktor keinginan akan perubahan dan keinginan mendapat pengganti Faktor tersebut, suatu saat, mampu menggerakkan sebuah gerakan massa yang bergerak seketika, menuntut perubahan revolusioner¹⁹.

➤ **Penyebab Konflik Politik**

Konflik sebagai akibat dari menjamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidak sepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanyarasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha

¹⁹ Eric Hoffer, *Gerakan Massa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi²⁰.

Menurut Ramlan Subakti (2010) , konflik politik dapat terjadi karena disebabkan oleh dua hal:

- Konflik kemajemukan horisontal

Konflik yang terjadi berkaitan dengan kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam anti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, muliter, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.

- Konflik kemajemukan vertikal

Konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan strata atau tingkatan dalam masyarakat. Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang berciri demikianini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

Sebuah masalah yang timbul tentunya ada penyebab mengapa masalah itu terjadi, begitu juga dengan konflik. Konflik muncul sebagai akibat adanya perbedaan dan benturan kepentingan yang saling berhadapan. Fisher, dkk dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said menjelaskan tentang berbagai teori penyebab konflik. Berikut ini berbagai teori penyebab konflik²¹:

²⁰ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*.

²¹ Sahih Gatara and Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

1. Teori Hubungan Masyarakat

Konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial, serta ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk. Teori ini membantu menjelaskan adanya kemajemukan dan ketegangan sosial yang terjadi karena perbedaan dan pertentangan kepentingan, prinsip dan kehendak yang ada.

2. Teori Negosiasi Prinsip

Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Negosiasi adalah upaya mencapai mufakat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin mengambil keputusan bersama dan untuk mencapai kemufakatan.

3. Teori Kebutuhan Manusia

Konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Dengan memahami teori ini akan membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mencapai kesepakatan. Menurut Maslow dalam Lianto (2010: 27) membagi kebutuhan dasar manusia menjadi:

- Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, istirahat, dan udara. Tak diragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah

kebutuhan fisiologis dan bukan yang lainnya.

- **Kebutuhan Rasa Aman**

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, munculah kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemandirian, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekhawatiran, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Jika hal-hal itu tidak ditemukan, maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras untuk menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan.

- **Kebutuhan Sosial**

Kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Ia membutuhkan terutama tempat (peranan) di tengah kelompok atau lingkungannya, dan akan berusaha keras untuk mencapai dan mempertahankannya.

- **Kebutuhan Penghargaan**

Maslow membedakan kebutuhan penghargaan menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Pertama, (*internal*) mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan atau kemerdekaan. Kedua, (*eksternal*) menyangkut penghargaan dari orang lain, pengakuan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik.

- **Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri**

Menurut Maslow setiap orang harus berkembang sepenuhnya kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut sebagai aktualisasi diri. Maslow juga menyebut aktualisasi diri sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sepenuhnya kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang

dimiliki.

4. Teori Identitas

Konflik cenderung disebabkan karena identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

5. Teori Transformasi Konflik

Konflik disebabkan oleh hadirnya masalah- masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Selain berdasarkan teori, Hidayat dalam Wahyudi (2009: 144) menjelaskan secara sederhana bahwa konflik disebabkan oleh pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan budaya yang berbeda. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Wahyudi, 2009: 144).

➤ Tipe Konflik

Menurut Ramlan Surbakti, konflik secara umum dikelompokkan menjadi dua tipe, kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif.

Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang disalurkan melalui tindakan anarki, kudeta, sapatisme, dan revolusi²².

➤ **Struktur Konflik**

Menurut Paul Conn dalam Subakti (1992: 154), situasi konflik ada dua jenis, pertama konflik menang-kalah (zero-sum-conflict) dan konflik menang-menang (non-zero-sum-conflict). Konflik menang kalah adalah konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak mungkin tercapainya suatu kompromi antara masing-masing pihak yang berkonflik. Ciri-ciri dari konflik ini adalah tidak mengadakan kerjasama, dan hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja. Konflik menang-menang adalah suatu konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin mengadakan kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut²³.

➤ **Pengelolaan Konflik Politik**

Dalam konteks demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai konflik politik, dimana konflik tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini berlanjut pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi pengelolaan konflik (*management conflict*). Ini sebuah perbedaan sangat penting. Pertama, penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, pengelolaan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah tadi tentu masih menjadi perdebatan (debatable) hal ini menunjukkan bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk

²² Subakti, *Memahami Ilmu Politik*.

²³ Subakti.

istilah-istilahnya.

Terdapat beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses²⁴. Pendekatan ini menggambarkan sebagai berikut. *Pertama*, istilah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. *Kedua*, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. *Ketiga*, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak- pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab- sebab konflik dan berusaha membangun hubunganbaru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transformasi konflik yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Menelola konflik yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik²⁵.

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada

²⁴ Simon Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001).

²⁵ Peter Harris, *Demokrasi Dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator* (Jakarta: International Institute Democracy and Electoral Assistance, 2000).

konfrontasi dan kekerasan²⁶.

Terdapat beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik menurut Boulding seperti:

- Adanya pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik.
- Analisis situasi yang menyertai konflik, misalnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan, cara, teritori, atau kombinasi dari faktor- faktor.
- Analisis perilaku semua pihak yang terlibat.
- Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian.
- Fasilitas komunikasi, yaitu membuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi dan dialog, dalam rangka mendengarkan.
- Negosiasi, yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
- Rumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya;
- Hiduplah dengan konflik, karena semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya²⁷.

²⁶ Timothy D Siska, *Demokrasi Di Tingkat Lokal (Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik Dan Pemerintahan)* (Jakarta, 2002).

²⁷ Alo Liliweri, *Prasangka Dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)* (Yogyakarta: LKIS, 2005).

Tindakan dalam pengelolaan konflik dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu: 1) Mengelola konflik secara langsung; 2) Mengelola berbagai akibat konflik; dan 3) Mempengaruhi struktur sosial²⁸. Kemudian Fisher menyatakan bahwa mengelola konflik secara langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut²⁹:

- a. Tahap Persiapan Intervensi
 - Mengidentifikasi, memilih dan mengubah pendekatan terhadap konflik. Dalam hal ini terdapat 5 pendekatan yang dapat dicermati, yakni: (1) Kompromi (Mengurangi harapan-harapan, tawar, memberi dan menerima dan memecah perbedaan); (2) Akomodasi (Memberikan persetujuan, menentramkan mengurangi atau mengabaikan perbedaan pendapat, menyerah); (3) Pemecahan Masalah (Pengumpulan informasi, dialog, mencari alternatif); (4) Pengendalian (Mengendalikan, menyaingi, menekan, memaksa, bertempur); (5) Penolakan (Menolak, melarikan diri, menyangkal, mengabaikan, menarik diri, menunda).
 - Mengidentifikasi dan mengurangi prasangka.
- b. Tahap Meningkatkan dan Mobilisasi untuk Mendukung Perubahan yaitu dengan (1) Melobi kepada para pengambil keputusan dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka; (2) Berkampanye, dengan tujuan utamanya adalah menciptakan iklim di kalangan public yang lebih luas, yang akan mendorong atau menekan para pengambil keputusan untuk mengubah kebijakan mereka; (3) Tindakan langsung dengan tanpa kekerasan melalui: Protes, anti kerjasama, ketidakpatuhan sipil, dan berprasa.
- c. Tahap Pencegahan Mencegah konflik memanas sehingga berubah sekedar menjadi tindak kekerasan, atau bahkan tidak menjadi konflik. Beberapa mekanisme

²⁸ Fisher, *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*.

²⁹ Fisher.

yang dapat di pilih, misalnya: (1) Membentuk forum yang berasal dari berbagai bagian masyarakat; (2) Mengirim sesepuh dari marga, suku, atau kelompok tradisional lainnya sebagai utusan; (3) Mengundang tokoh-tokoh agama untuk melakukan intervensi, dengan tujuan menyediakan ruang untuk dialog; (4) Memanfaatkan ritual yang ada dengan tujuan untuk membawa orang bersama-sama memperhatikan nilai-nilai yang ada; (5) Memanfaatkan struktur atau kelompok yang ada dan di hormati; (6) Menggunakan publikasi secara hati-hati untuk menyoroiti kebutuhan tindakan darurat.

- d. Tahap Mempertahankan Kehadiran Para aktivis lokal dan para pekerja perdamaian dan hak asasi manusia di harapkan dapat mempertahankan kehadirannya, dengan tujuan dapat memberikan bantuan secara efektif, dan mempengaruhi suasana kembali normal. Tindakan yang dapat di lakukan di sini dapat berupa; (1) perlindungan tanpa senjata; (2) Aktif melakukan pemantauan dan observasi terhadap perkembangan situasi. Tindakan pengelolaan konflik berupa upaya untuk mempengaruhi struktur sosial.

Dalam hal ini terdapat tiga cara yang dapat ditempuh, yakni: Pertama, penyelenggaraan pendidikan, perdamaian dan keadilan, di institusi-institusi formal, informal maupun non formal. Dalam kerangka ini anggota masyarakat diarahkan untuk memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan damai dan adil kepada sesama manusia. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketiga, membangun pemerintah global. Pemerintah yang baik setidaknya memberikan peluang kepada proses konsultif, rakyat- pemerintah dan masyarakat madani untuk semakin mandiri³⁰.

Dalam kerangka konflik politik akhir-akhir ini, istilah pengelolaan konflik atau manajemen konflik lebih marak dengan istilah resolusi konflik. Menurut Morton Deutch dalam bukunya,

³⁰ Fisher.

The Resolution of Conflict adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik³¹.

Dengan demikian bahwa didalam penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya merupakan suatu proses mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Sejauh perangkat peraturan itu dipandang adil oleh segenap lapisan masyarakat dan tidak ada kelompok mayoritas yang menentang atau berniat mengganti peraturan itu, konflik yang ada bisa dikatakan berhasil diselesaikan.

- **Konflik Politik dan Penyelesaiannya**

Berikut ini pembahasan salah satu contoh konflik politik yang terjadi di Indonesia:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Mahi dalam pemilihan bupati tahun 2013 Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan konco ale ate. Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan, hasil rekapitulasi dalam pemilihan bupati Sumba Barat Daya 2013 yang benar adalah rekapitulasi sebagaimana yang dituangkan KUP SBD dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan bupati Sumba Barat tertanggal 10 Agustus 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memicu bentrokan antar pendukung pasangan calon, sehingga tiga orang meninggal dunia dan 19 rumah penduduk terbakar serta ratusan warga mengungsi ke Waetabula, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya³².

Analisis model resolusi konflik atas dasar hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lombok Barat dengan memperhatikan catatan lapangan (*field records*), tepatnya atas dasar data emik yang dikumpulkan dari subyek-subyek penelitian, serta dengan mengikuti proses analisa data

³¹ Liliwari, *Prasangka Dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*.

³² Hikmat M Mahi, "Pemetaan Masalah Dan Solusi Konflik Lokal Dalam Pilkada Langsung Di Indonesia," *MIMBAR* 30, no. 1 (2014).

sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Data tentang resolusi konflik Pilkada tersebut dapat direduksi (*data reduction*) ke dalam tabel di bawah ini:

No.	FOKUS	DESKIPSI
1.	Persepsi tentang Penyebab Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dominasi ekonomi dan politik di kelompok tertentu; 2. Sikap tidak simpatik terhadap petugas dan sistem atau mekanisme administrasi Pilkada;
2	Kategori Aktor Resolusi Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktor Politik; 2. Aktor Ekonomi;
3	Peran Aktor dalam Resolusi Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan konflik; 2. Penyelesaian konflik (mengakiri); 3. Pengelolaan konflik (membatasi dan menghindari meluasnya kekerasan); 4. Resolusi konflik (membangun hubungan
4	Tujuan Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji validitas bukti-bukti material; 2. Menghentikan konflik dan
5	Strategi Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme legal-formal;
6	Tempat Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian dan Pengadilan;
7	Hasil Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketetapan hukum legal formal;

Sumber: Sugiono Metode Penelitian Bisnis 2008 hasil reduksi data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Penelitian diatas menemukan model resolusi konflik yang kemudian kita sebut dengan fluidity resolution models atau model resolusi yang mencair sebagaimana tergambar dalam tabel atas. Disebut dengan model resolusi yang mencair karena menurut temuan di lapangan, ternyata model baku yang ditawarkan pemerintah melalui desk Pilkada tidak fungsional untuk merespon dinamika konflik yang muncul. Warga lebih memilih jalur *formal resolution*, jika konflik yang terjadi disebabkan oleh persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan pelanggaran ketentuan hukum positif. Namun jika akar konflik Pilkada itu disebabkan oleh persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi, maka warga lebih memilih jalur informal and *accidental resolution*. Ketidak-bakuan atau keluwesan mekanisme resolusi konflik semacam inilah yang kemudian penelitian ini menyebutnya sebagai model resolusi yang mencair.

Berdasarkan hasil reduksi data di atas, selanjutnya kategori-kategori utama, atau konsep-konsep pokok yang ditemukan di lapangan yang terkait dengan proses resolusi konflik kemudian dijadikan bahan untuk dilakukannya display data. Tahap ini merupakan fase dimana kategori pokok yang ditemukan kemudian dicoba saling dihubungkan atau dikoneksikan dengan tujuan agar semakin nampak jelas model yang akan dicari dalam suatu penelitian.

Sebagaimana dipaparkan di bagian tabel diatas, Resolusi tersebut merupakan fungsi dari nilai-nilai dan atau norma-norma sosial budaya (termasuk di dalamnya tentu terkait dengan nilai-nilai agama) yang sangat dihormati oleh warga masyarakat.

- **RANGKUMAN**

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Konflik politik dapat disebabkan oleh konflik kemajemukan horisontal dan konflik kemajemukan vertikal. Terdapat berbagai teori yang mengkaji penyebab konflik diantaranya; teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas dan teori transformasi konflik. Selanjutnya terdapat dua tipe konflik yaitu konflik positif dan konflik negatif. Sedangkan menurut struktur konflik, konflik dibedakan menjadi konflik menang-kalah dan konflik menang-menang. Pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan; mengelola konflik secara langsung, mengelola berbagai akibat konflik dan mempengaruhi struktur sosial.

TES FORMATIF

➤ PILIHAN GANDA

1. Pengertian konflik adalah sebagai berikut, kecuali...
 - a. Perbedaan pendapat
 - b. Persaingan
 - c. Pertentangan
 - d. Persetujuan

2. Menurut Ramlan Surbakti konflik disebabkan oleh dua hal...
 - a. Kemajemukan horozizontal & vertikal
 - b. Perdebatan & pertikaian
 - c. Rasa dendam & iri
 - d. Pola pikir

3. Teori penyebab konflik adalah sebagai berikut, kecuali...
 - a. Teori hubungan masyarakat
 - b. Teori manajemen krisis
 - c. Teori negosiasi prinsip
 - d. Teori identitas

4. Dibawah ini merupakan situasi konflik...
 - a. Menang – kalah
 - b. Menang – draw
 - c. Seimbang
 - d. Kalah – persetujuan

5. Konflik dapat diminimalisir jika kebutuha individu terpenuhi, berikut ini yang termasuk kebutuhan dasar manusia menurut Maslow...
 - a. Sandang, pangan & papan
 - b. Kebutuhan fisiologis & kebutuhan aktualisasi diri
 - c. Kebutuhan rasa aman & kebutuhan memiliki
 - d. Kebutuhan berpendapat & kebutuhan pemenuhan hak

6. Berikut ini yang merupakan konflik politik adalah...
 - a. Perebutan harta
 - b. Konflik pilkada
 - c. Pengeroyokan antar pelajar
 - d. Mencuri

7. Terdapat lima pendekatan dalam tahap intervensi, diantaranya adalah...
 - a. Akomodasi
 - b. Musyawarah
 - c. Manajemen krisis
 - d. Semua benar

8. Istilah resolusi konflik dikemukakan oleh...
 - a. Morton Deutch
 - b. Alo Liliweri
 - c. Simon Fisher
 - d. Ivy Lee

9. Menurut teori identitas, konflik disebabkan karena...
 - a. Penderitaan masa lalu yang belum terselesaikan
 - b. Konstruksi makna diri
 - c. Pemikiran dan penalaran
 - d. Pemahaman diri

10. Konsep manajemen konflik menurut Boulding diantaranya adalah...
 - a. Pengakuan dalam setiap masyarakat selalu ada konflik
 - b. Sebelum konflik diselesaikan harus ada kesepakatan
 - c. Konflik harus diselesaikan dengan kekeluargaan
 - d. Persidangan merupakan cara menyelesaikan konflik

➤ **LATIHAN**

1. Tuliskan dan uraikan pengertian konflik politik menurut anda!
2. Mengapa sebagai abdi negara kita harus memahami konflik politik?
3. Tuliskan teori penyebab konflik yang dikemukakan fisher dan berikan contohnya!
4. Uraikan situasi konflik Paul Conn dan berikan contohnya!
5. Jelaskan satu konflik politik di Indonesia dan buatlah *data reduction* mengenai penanganan yang tepat untuk konflik tersebut dalam tabel yang dikemukakan Miles dan Huberman!